

IMPLEMENTASI IMPERATIF KATEGORIS DALAM SISTEM PENDIDIKAN

Setya Widyawati

Jurusan Seni Tari

Fakultas Seni Pertunjukan ISI Surakarta

Abstract

This study entitled The Implementation Categorical Imperatives in The Education System aims to determine the ethical thinking of Immanuel Kant, his inference, as well as its implementation in learning. This is a literature study using axiological approach in the branch of ethics. The material object is the implementation of ethical thinking into learning while the formal object is axiological philosophy. Immanuel Kant was a German philosopher (1724-1804) who suggested that the first argument of morality is to have true moral values. Deeds needed to be done in terms of liability. The second proposition is an act done out of obligation that does not have the moral objectives to be achieved through but in the doctrine in which it is determined. Therefore, the moral value does not depend on the realization of the object but only works on the principle of volition by which the act is done without regard to the objects of basic skills. The government's policy in shaping characters is done gradually starting in 2004 with Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK; Competency-based Curriculum). At 2011, the government issued Kurikulum Pendidikan Karakter (Character Education Curriculum). The most actual policy for higher education was issued in 2013 entitled Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT; National Standard of Higher Education) referring to Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI; National Framework's Qualification of Indonesia). Learning is one of the objects in the education system. Art education system is a unique educational system because it accentuates the value of ethnic cultural heritage as part of the national identity. Relevance between Immanuel Kant's categorical imperative with the world of education lies in the role of the categorical imperative that inspires people to realize the importance of good will unconditionally. Internal awareness of inherent is a soft skill so as to contribute in the education world. In turn, education will produce quality output that is sought after by the world of work.

Keywords: ethics, curriculum, learning, educational system, the categorical imperative.

Pendahuluan

Etika dalam pembelajaran memiliki peran penting dalam mewujudkan ketercapaian hasil belajar. Hasil belajar bukan hanya melulu pada ketercapaian indeks prestasi saja namun juga pada aspek pembentukan karakter. Dalam proses pembelajaran aspek pembentukan karakter ini terkadang sering dilalaikan. Krisis multidemensi yang dialami bangsa Indonesia saat ini salah satu sebabnya adalah lemahnya sistem pendidikan dalam membentuk kepribadian atau karakter mulia peserta didik.

Mencermati kebijakan kurikulum berbasis kompetensi yang disosialisasikan mulai tahun 2004 jelas terlihat bahwa kebijakan saat itu ada pada perubahan strategi pembelajaran yang semula berfokus pada *teacher center learning* berubah menjadi *student center learning*. Kemandirian

peserta didik menjadi *urgent* karena akan menghadapi kemajuan dunia global yang serba cepat dan canggih. Disini pembentukan sikap tidak tercermin dalam kurikulum dan hanya disebut sebagai *hidden curriculum* atau kurikulum tersamar/tersembunyi.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kemendiknas Dirjendikti mulai bulan Juni tahun 2011 mencanangkan pendidikan berbasis pembentukan karakter. Bahkan pendidikan karakter menjadi persoalan utama bangsa Indonesia. Dalam Panduan Penyelenggaraan Sosialisasi dan Implementasi Kebijakan Nasional Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi dipaparkan bahwa:

Pembangunan watak (*character building*) adalah amat penting. Kita ingin membangun manusia Indonesia yang berakhlak, berbudi

pekerti, dan berperilaku baik. Bangsa kita ingin pula memiliki peradaban yang unggul dan mulia. Peradaban demikian dapat kita capai apabila masyarakat kita juga merupakan masyarakat yang baik (*good society*). Dan, masyarakat idaman seperti ini dapat kita wujudkan manakala manusia-manusia Indonesia adalah manusia yang berakhlak dan berwatak baik, manusia yang bermoral dan beretika baik, serta manusia yang bertutur dan berperilaku baik pula (Kemendiknas Dirjendikti, 2011:1).

Untuk mewujudkan kebijakan pemerintah ini diperlukan cara atau strategi pengembangan karakter melalui pembelajaran. Penguatan matakuliah yang menekankan pada pendidikan karakter perlu dicermati kembali sehingga dapat mendukung tujuan ini.

Kebijakan selanjutnya pada tahun 2013, pemerintah melalui Kemendiknas Dirjendikti mewacanakan pengembangan kurikulum dengan penekanan pada capaian pembelajaran (CP) atau *learning outcomes* (LO) sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang mengacu pada level Kualifikasi Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI). Kebijakan ini dibuat merupakan penyempurnaan dari perubahan kurikulum sebelumnya. Pada kebijakan ini, ketercapaian pembelajaran harus sesuai dengan level KKNI yang memiliki 9 hirarki. Untuk kajian ini ketercapaian profil S-1 ada pada level 6.

Ketercapaian pembelajaran dalam level KKNI ada empat indikator yaitu 1) sikap dan tata nilai; 2) kemampuan kerja; 3) penguasaan pengetahuan; 4) hak/ wewenang dan tanggung jawab (Tim Dikti, 2013:12). Sikap dan tata nilai harus menjadi deskripsi umum pada setiap level. Dengan ketercapaian indikator ini maka diharapkan pembentukan karakter mulia akan dapat terwujud.

Dalam ilmu filsafat ada tiga ranah pembahasan yang dapat mencakup semua ilmu yaitu ranah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pembentukan karakter atau pembentukan sikap dan tata nilai termasuk dalam ranah filsafat nilai atau aksiologi. Penelitian ini mengambil objek formal aksiologi dan objek material adalah tentang nilai etika atau moral *imperatif kategoris*. *Imperatif kategoris* adalah buah pemikiran seorang filsuf Jerman yaitu Immanuel Kant.

Immanuel Kant (1724-1804) telah mengemukakan dalil tentang etika atau moral sebagai berikut.

The first proposition of morality is that to have genuine moral worth, an action must be done from duty. The second proposition is: An action done from duty does not have its moral worth in the purpose which is to be achieved through it but in the maxim whereby it is determined. Its moral value, therefore, does not depend upon the realization of the object of the action but merely on the principle of the volition by which the action is done irrespective of the objects of the faculty of desire (Kant, 1990: 15-16).

Dari kutipan tersebut dapat dimaknai bahwa Kant mengemukakan dalil pertama moralitas adalah memiliki nilai moral sejati, perbuatan harus dikerjakan dari sisi kewajiban. Dalil kedua adalah: perbuatan dikerjakan dari kewajiban yang tidak memiliki moralnya dalam tujuan yang akan dicapai melaluinya tetapi dalam ajaran dimana itu ditentukan. Nilai moralnya, karena itu, tidak bergantung pada realisasi objek perbuatan tetapi hanya pada prinsip kemauan dengan mana perbuatan dikerjakan tanpa memperhatikan objek-objek kecakapan kehendak.

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut muncul permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana bentuk pemikiran etika Immanuel Kant? Bagaimana implementasi pemikiran etika Immanuel Kant dalam pembelajaran? Permasalahan tersebut harus mendapatkan jawaban yang tepat sehingga tujuan pokok dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pemikiran etika Immanuel Kant dan untuk menerapkan pemikiran etika Immanuel Kant dalam pembelajaran.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian ini. Data-data kepustakaan dikumpulkan kemudian dilakukan analisis dengan memilah dan memilih untuk menentukan data-data yang akurat dan tepat.

Hasil dan Pembahasan

Kesadaran moral merupakan salah satu pemikiran Immanuel Kant dalam Etika. Kesadaran moral menurut Kant meliputi “kehendak sebagai rasio praktis, imperatif yang sifatnya hipotetis, imperatif moral sifatnya kategoris, kemudian derivasi rumusan

lain dari imperatif ini. Dari rumusan ini muncul dua konsep penting yaitu otonomi kehendak dan martabat manusia (Kant, 2004: 48-49).”

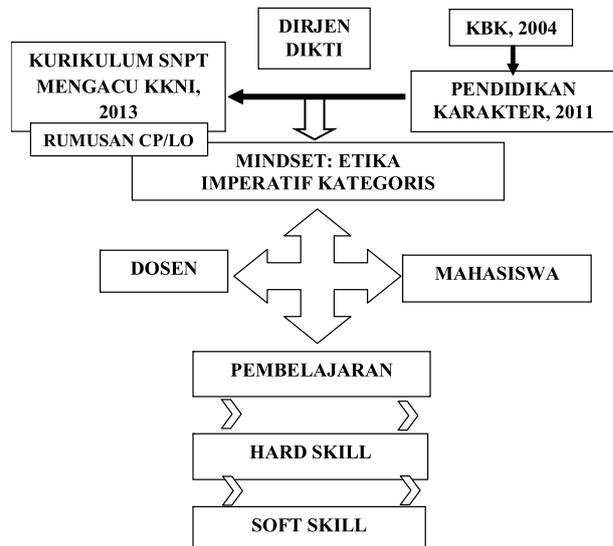
Rumusan tersebut menjadi teori kesadaran moral *imperatif kategoris* yaitu *if the action is thought of as good in itself and hence necessary in a will which of itself conforms to reason as the principle of this will, the imperatif is categorical* (Kant, 1990: 31). Suatu perbuatan disebut *imperatif kategoris* apabila kebaikan itu ada pada dirinya sendiri dan dengan demikian harus dalam kehendak yang datang dari dirinya sendiri sesuai dengan akal sebagai prinsip dari kehendak ini. Lebih lanjut Kant mengatakan bahwa *act only according to that maxim by which you can at the same time will that it should become a universal law* (Kant, 1990: 38). *A maxim is the subjective principle of acting and must be distinguished from the objective principle (i.e., the practical law)* (Kant, 1990: 37). *Maxim* adalah suatu prinsip yang mendasari suatu perbuatan bersifat personal. Oleh karena itu, prinsip ini adalah prinsip yang subjektif, yang mendasari dan menyebabkan suatu subjek bertindak (Asdi, 1997: 52). Jadi perbuatan hanya sesuai dengan *maxim* yang mana pada saat yang bersamaan kehendak itu harus menjadi hukum universal.

Asdi menegaskan bahwa rumus *imperatif kategoris* adalah pernyataan ini: bertindaklah hanya sesuai dengan maksimummu, sehingga kamu sekaligus dapat mengharapkan, bahwa maksimum itu menjadi pedoman umum (Asdi, 1997: 51). *Imperatif kategoris* adalah suatu perintah yang tidak terikat pada akibat yang ditimbulkan oleh tindakan, dan tidak terikat pada larangan. Perintah ini datang dari dalam diri manusia, tetapi tidak memaksa (Asdi, 1997: 51).

Kehendak baik merupakan bagian dari *soft skills* yang bebas pengaruh/tanpa pamrih akan mengandaikan munculnya tindakan yang kebbaikannya tidak perlu diragukan lagi. Kehendak baik akan mendasari tindakan manusia sehingga memberi warna pada setiap aktivitasnya. Dalam kehidupan sosial, dimana interaksi antar manusia menjadi faktor utama, maka kehendak baik harus merupakan pertimbangan utama dalam komunikasi dan penentuan keputusan. Dalam interaksinya ini manusia membutuhkan kesadaran moral karena kesadaran moral ini merupakan *soft skill* yang digunakan untuk membuka kehidupan yang baik, penuh makna. Moral dapat mengarahkan manusia untuk bertindak sehingga menjadi tuntunan bagi perbuatannya.

Implementasi Imperatif Kategoris Dalam Sistem Pendidikan

Bagan alir berikut ini akan menjelaskan implementasi teori etika Immanuel Kant yaitu *Imperatif Kategoris*



Pendidikan sebagai sistem selalu melibatkan adanya interaksi. Dalam interaksinya ini manusia membutuhkan kesadaran moral karena kesadaran moral merupakan *soft skill* yang digunakan untuk membuka kehidupan yang baik, penuh makna. Moral dapat mengarahkan manusia untuk bertindak sehingga menjadi tuntunan bagi perbuatannya.

Menurut Kant, ada dua macam imperatif, yaitu imperatif hipotetis dan imperatif kategoris. *All imperatives command either hypothetically or categorically* (White Beck, 1990:30). *The hypothetical imperative, therefore, says only that the action is good to some purpose, possible or actual. In the former case, it is a problematical, in the latter an assertorical, practical principle* (White Beck, 1990:31). Imperatif hipotetis adalah perintah bersyarat, berlaku secara umum. Perintah ini mengatakan suatu tindakan yang diperlukan sebagai sarana atau syarat untuk mencapai sesuatu yang lain (Tjahjadi, 1990:49). *The categorical imperative, which declares the action to be of itself objectively necessary without making any reference to any end in view (i.e., without having any other purpose), holds as an apodictical practical principle* (White Beck, 1990:31). Sedangkan imperatif kategoris adalah perintah mutlak: berlaku umum, selalu dan di mana-mana (maka,

universal). Imperatif kategoris ini tidak berhubungan dengan sesuatu tujuan yang mau dicapai. Sifat dari imperatif kategoris adalah formal, artinya hanya merumuskan syarat yang harus dipenuhi oleh perbuatan mana pun juga agar dapat memperoleh nilai moral yang baik, terlepas dari tujuan materialnya. *The moral (categorical) imperative, says that I should act in this or that way even though I have not willed anything else.* (Beck, 1990:59). Pokoknya, imperatif kategoris berkata, “Kamu wajib!”. Dan karena “kamu wajib”, maka “kamu bisa”. Kata Kant, tidak mungkinlah budi praktis mewajibkan kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan (Tjahjadi, 1990:50).

Kalau kita menuruti imperatif hipotetis, ada bahaya bahwa perintah itu ditaati hanya karena kepentingan diri sendiri belaka, sehingga tersirat di dalamnya suatu dorongan egoistis. Namun tidaklah demikian halnya dengan imperatif kategoris. Kehendak dan hukum adalah satu. Inilah yang disebut Kant sebagai “budi praktis yang murni”. Tidak diperlukan alasan atau syarat apa pun bagi pelaksanaannya. Imperatif kategoris inilah yang dipandang Kant sebagai azas kesusilaan yang transendental. Keharusan yang transendental dan amat kokoh ini mewujudkan inti segala persoalan etis. Singkatnya, dalam imperatif kategoris terjadilah bahwa orang yang harus bertindak demi untuk kewajiban semata-mata. Keharusan ini bersifat mutlak, tidak memperhatikan selera suka-tidak suka, menguntungkan atau tidak menguntungkan kita (Tjahjadi, 1990:50).

Kant berusaha merumuskan perintah yang tidak bergoyah ini dalam aneka rumusan, yang di antaranya berbunyi, “Bertindaklah selalu berdasarkan maksim yang melaluinya kamu bisa sekaligus menghendaknya menjadi hukum umum” (*allgemeines Gesetz*) (Tjahjadi, 1990:50). Inilah pokok pikiran Kant yang dijadikan dasar tindakan pada sistem pembelajaran/pendidikan.

Sistem memiliki pengertian yang abstrak, namun secara teknis berarti seperangkat komponen yang saling berhubungan dan bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. (Paulina Pannen, 2001:1) Dalam ruang lingkup pendidikan terjadi interaksi antara bermacam-macam aspek atau elemen yang memiliki kompleksitas. Masing-masing elemen saling berhubungan sehingga terbuka kemungkinan saling mempengaruhi. Kompleksitas interaksi itu akan membentuk sebuah sistem yang disebut sistem pendidikan.

Dunia pendidikan merupakan sebuah sistem terbuka, karena selalu terkait dan berinteraksi dengan sistem-sistem lain seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem pasar kerja. Sistem-sistem di luar sistem pendidikan ini disebut supra sistem. Penggunaan analisis sistem merupakan cara yang tepat untuk memecahkan berbagai permasalahan pendidikan. Prinsip utama penggunaan analisis sistem adalah berpikir secara sistematis, yakni memperhitungkan segenap komponen dalam menangani permasalahan pendidikan. Oleh karena itu dapat dikemukakan ciri-ciri umum suatu sistem sebagai berikut:

1. Sistem merupakan satu kesatuan yang holistik
2. Sistem memiliki bagian-bagian yang tersusun sistematis dan berhierarki
3. Bagian-bagian sistem itu berelasi antara satu dengan lainnya
4. Tiap-tiap bagian sistem *concern*/peduli terhadap konteks lingkungannya. (Tatang dalam Juono, 2013)

Pendidikan merupakan salah satu sistem terbuka, karena pendidikan itu tidak akan dapat berjalan dengan sendirinya tanpa berhubungan dengan sistem-sistem lain di luar sistem pendidikan. Ciri-ciri pendidikan sebagai sebuah sistem terbuka antara lain:

1. Mengimpor energi, materi, dan informasi dari luar,
2. Memiliki pemroses,
3. Menghasilkan output,
4. Merupakan kejadian yang berantai,
5. Memiliki *negative entropy*,
6. Memiliki alur,
7. Ada kestabilan yang dinamis,
8. Memiliki deferensiasi, dan
9. Ada prinsip *equifinality*. (Tatang dalam Juono:2013)

Dalam mengimpor energi, materi, dan informasi dari luar, pendidikan mendatangkan pengajar, uang, alat-alat belajar, para peserta didik, dan sebagainya dari luar lembaga pendidikan. Pendidikan memproses peserta didik dalam aktivitas belajar dan pembelajaran. Pendidikan menghasilkan *output* atau mengekspor energi, materi, dan informasi sehingga pendidikan merupakan kejadian yang berantai. Memproses peserta didik (*input* pendidikan) merupakan kegiatan yang berulang-ulang dan saling berkaitan.

Pendidikan harus memiliki *negative entropy*, yaitu suatu usaha untuk menahan kepunahan dengan cara membuat impor lebih besar dari pada ekspor. Dalam pendidikan hal ini dilakukan dengan cara mengantisipasi perubahan lingkungan dan memperbaiki kerusakan. Salah satunya adalah memiliki alur informasi sebagai umpan balik untuk memperbaiki diri. Segala informasi yang terkait dengan pendidikan dimanfaatkan oleh penyelenggara pendidikan untuk mengambil keputusan dalam rangka mempertahankan dan memperbaiki pendidikan.

Pendidikan selalu dinamis mencari yang baru, memperbaiki diri, memajukan diri agar tidak ketinggalan zaman, bahkan berusaha mengantisipasi dan menyongsong masa depan. Pendidikan memiliki *deferensiasi*, yakni spesialisasi-spesialisasi. Dalam organisasi pendidikan ada bagian pengajaran, keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan dan sebagainya. Masing-masing bagian ini masih dapat dipilah-pilah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Dalam pendidikan ada prinsip *equifinality*, yaitu banyak jalan untuk mencapai tujuan yang sama. Para pendidik boleh berkreasi menciptakan cara-cara baru yang lebih baik dalam usaha memajukan pendidikan.

Berpijak dari simpul pemikiran Immanuel Kant, pelaku setiap komponen dalam sistem pendidikan memiliki pedoman arah dalam bertindak. Pelaku komponen dalam sistem pendidikan adalah sumber daya manusia yang menjadi garda depan pemberi kontribusi terhadap ketercapaian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah membentuk mahasiswa menjadi manusia yang jujur, cerdas, tangguh, dan peduli. Mengutip istilah yang dicetuskan oleh Nopriadi Hermani, manusia memiliki “model diri/ *self model*”. Model diri ini semacam *chips* yang tertanam dan terprogram dalam diri manusia yang merepresentasikan “siapa dan bagaimana saya saat ini” (Hermani, 2014:xvii). Model diri manusia ini terprogram dan terbentuk bersama dengan berjalannya waktu dalam kehidupannya. *Imperatif kategoris*, dalam hal ini menjadi dasar pikiran, perasaan, dan tindakan yang akan memprogram setiap pelaku komponen pendidikan. Dengan demikian akan membentuk model diri yang positif.

Imperatif kategoris mengarahkan manusia untuk bertindak sesuai dengan perintah, tanpa membantah. Perintah dikerjakan karena merupakan kewajiban yang harus dikerjakan demi kewajiban itu sendiri.

Simpulan

Sistem pendidikan di Indonesia berkali-kali mengalami perubahan aturan dan kebijakan yang terwujud dalam kurikulum. Hal ini wajar terjadi karena perubahan tersebut diniatkan untuk mencapai tujuan yang lebih baik dari sebelumnya. Perjalanan perubahan sistem pendidikan yang implementasinya pada perubahan kurikulum dapat dilihat kronologinya. Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dicanangkan pada tahun 2004. Kurikulum ini telah diterapkan di semua tingkat pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pada tahun 2011, setelah diterapkan selama enam tahun, KBK diganti dengan kurikulum berbasis karakter. Kurikulum ini bertujuan membentuk karakter mulia para peserta didik. Baru berjalan dua tahun, kurikulum ini diganti dengan kurikulum KKNi, yaitu pada tahun 2015.

Dalam sistem pendidikan dan pembelajaran banyak komponen yang berperan di dalamnya. Masing-masing memiliki peran yang saling melengkapi satu sama lain. Tidak ada suatu komponen dianggap lebih penting dari komponen yang lain. Masing-masing komponen dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidangnya. Manusia sebagai pelaku sistem pasti memiliki kepentingan pribadi yang kadang-kadang tidak relevan dengan kompetensinya. Hal ini akan berdampak pada proses dan *output*-nya. Oleh karena itu, ada aturan yang mengaturnya.

Dalam menyikapi adanya aturan pada suatu sistem maka setiap manusia yang bertugas di dalamnya harus benar-benar memiliki komitmen kuat, loyalitas, dan kredibilitas tinggi. Implementasi pemikiran Kant, *imperatif kategoris*, memberikan pedoman dalam bertindak, berperilaku, mengarahkan sikap dalam menghadapi peraturan-peraturan, kewajiban-kewajiban dalam segala bidang aktifitas manusia. Manusia sebagai pelaku sistem pendidikan mengerjakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sesuai dengan *job description* masing-masing.

Tujuan pendidikan akan tercapai sesuai dengan cita-citanya, yaitu menghasilkan lulusan yang jujur, cerdas, tangguh, dan peduli. Dengan kata lain, lulusan memiliki *hard skill* dan *soft skill* sebagai bekal terjun di masyarakat. Lulusan mampu menjadi solusi atas permasalahan yang timbul di masyarakat, di samping dia dapat membuat solusi bagi masalahnya sendiri.

Kepustakaan

Ali, Hamdani, 1987, *Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta: Kota Kembang

- Amirin, Tatang M., 1992, Pokok-pokok Teori Sistem, Jakarta: Rajawali Pers.
- Asdi, Endang Daruni, 1997, *Imperatif Kategoris dalam Filsafat Moral Immanuel Kant*, Yogyakarta: Penerbit Lukman Offset.
- Hawasi, 2003, *Immanuel Kant*, Jakarta: Poliyama Widyapustaka
- Kant, Immanuel, terj. Robby H. Abbror, 2004, *Dasar-dasar Metafisika Moral*, Yogyakarta: Insight Reference
- , terj. Nurhadi, 2005, *Kritik atas Akal Budi Praktis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- , 1990, terj. White Beck, *Foundations of the Metaphysics of Morals*, Yogyakarta: Insight Reference
- Kemendiknas Dirjen Dikti, 2011. “Implementasi Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi/ Implementasi Pendidik melalui Integrasi dalam Kurikulum 2011.
- , 2011. “Membangun Pendidikan Karakter Sebagai Pondasi Kesuksesan Bangsa dan Membentuk Kepemimpinan yang Berkarakter” Makalah, Yogyakarta: UGM.
- Pannen, Paulina, 2001, *Pendidikan sebagai Sistem*, Jakarta: PAU-PPAI-UT
- Tjahjadi, S.P. Lili, 1991. *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris* Yogyakarta: Kanisius